

## IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

**Julia Sri Anita<sup>1\*</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of the village fund budget in supporting infrastructure development in Pattappa Village, Pujananting District, Barru Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive type. The results of the research can be seen from 4 aspects, namely: (1) communication carried out by the village government with the community through socialization activities and village meetings is able to show that the village government has consistent attitudes and perceptions of SOP so that the community feels satisfied with the performance village government. (2) The resources owned by the Pattappa village government are good enough. (3) Disposition (disposition) related to the attitude of the implementer, the village government always tries to maximize the performance of village officials to improve the quality of good performance so that it has an impact on improving community welfare. (4) The bureaucratic structure of the village government in carrying out its duties must be in accordance with the basic performance measures and adapted to the existing understanding and procedures.*

**Keywords:** *implementation, village fund budget, development*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi anggaran dana desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian yang dapat dilihat dari 4 aspek yaitu: (1) komunikasi (*communication*) yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi maupun musyawarah desa mampu menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki sikap dan persepsi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah desa. (2) Sumber daya yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah cukup baik. (3) Disposisi (*disposition*) terkait dengan sikap pelaksana, pemerintah desa selalu berusaha untuk memaksimalkan kinerja aparat desa untuk meningkatkan kualitas kinerja yang baik sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan pemahaman dan prosedur yang ada.

**Kata kunci:** *implementasi, anggaran dana desa, pembangunan*

---

\* [juliasrianita@gmail.com](mailto:juliasrianita@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pembangunan suatu Negara pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pembangunan infrastruktur desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategi dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pamarataan pembangunan dan hasil hasilnya dapat menyentuh secara langsung terhadap kepentingan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di suatu pedesaan dalam upaya rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa yaitu dengan mengeluarkan Anggaran dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan dana desa. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 Menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa atau sebutan lain yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun saat ini kondisi masyarakat Desa Pattappa Kecamatan Pujananting masih kurang merasakan kehadiran program pemerintah baik itu implementasi pembangunan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat yang secara ekonomi masih kurang, partisipasi masyarakat dalam program pelaksanaan pembangunan infrastruktur

masih rendah, swadaya masyarakat rendah karena kondisi ekonomi yang masih sulit.

Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru salah satu daerah yang terletak di Sulawesi Selatan, Desa Pattappa termasuk desa yang berada di dalam wilayah kabupaten Barru. Dahulu, banyak masyarakat yang mengeluh dengan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai bagi masyarakat termasuk akses jalan yang kurang baik.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, setelah adanya pelaksanaan anggaran dana desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur di desa, mulailah terlihat perkembangan yang semakin meningkat seperti adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembuatan jalan tani, pembangunan lumbung desa dan pembangunan jalan yang merupakan akses penghubung bagi masyarakat desa.

Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru merupakan desa yang dulunya belum memiliki peningkatan pembangunan di bandingkan dengan desa yang lainnya, namun dengan adanya pembangunan infrastruktur yang di lakukan pemerintah, kini desa tersebut memiliki

kemajuan peningkatan pembangunan infrastruktur dan akses jalan yang memadai.

Menurut Nurdin Usman (Usman 2005:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Syauckani (2006:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengahatarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Hanifah Harsosno (2007:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program.

Menurut Guntur Setiawan (2009:39) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* diungkapkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : a) Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b) Sumber daya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah tinggal di kertas menjadi dokumen saja. c) Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. d) Struktur birokrasi, Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures / SOP).

Faktor-Faktor penghambat implementasi yaitu: a) aturan dan kebijakan yang berubah-ubah. b) kurangnya inovasi dari tim pelaksana. c) kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki kantor desa. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pada implementasi yaitu: a) Meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari aparatur atau perangkat desa. b) menambah fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja. c) Melakukan komunikasi dan konsultasi yang intens dengan pemerintah daerah yang berkewenangan.

Implementasi Anggaran sangat penting dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa, dengan adanya pembangunan desa yang maksimal maka dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut.

Sumber Anggaran desa bukan hanya dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melainkan juga dari

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), seperti: Pajak Bumi Bangunan (PBB) masyarakat desa, APBDes merupakan instrumen yang paling penting yang dapat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa.

Menurut Mardiasmo (2009), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu Anggaran.

Anggaran Desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa, serta ditetapkan oleh peraturan Desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (V. Wiratna Sujarweni: 2015).

## **METODE**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan

data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi anggaran desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattapa, maka penulis menggunakan 4 (Empat) indikator implementasi Teori dari George C. Edward III (dalam Agustino,2014:149-154). yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur organisasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting antar organisasi tidak hanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa akan tetapi komunikasi antar masyarakat juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu Implementasi agar bisa berjalan dengan baik.

Maka dari itu untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan antar aparat desa maupun komunikasi dengan masyarakat dalam melakukan

Implementasi Anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa Pattappa, Pemerintah Desa melakukan komunikasi melalui: (1). Kejelasan Informasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada pihak lain. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi karena adanya pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju dengan adanya pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak. (2). Penyaluran Informasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan sebab implementors yang melaksanakan kebijakan harus memahami apa yang harus mereka lakukan. (3). Konsistensi Informasi Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan Konsistensi Informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattappa

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattappa sudah baik, mereka saling mendukung satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, serta selalu menjaga hubungan baik antara aparat desa dengan masyarakat. Pemerintah desa juga sangat membantu dan berperang penting dalam meningkatkan keterampilan aparat desa.

Pemerintah desa melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap dan persepsi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas. Pemerintah desa juga selalu menjaga komunikasi baik dengan masyarakat melalui informasi yang jelas untuk meningkatkan motivasi dalam setiap kegiatan sosialisasi mengenai pembangunan desa. Selain itu masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa maka komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat terjalin dengan baik sehingga memudahkan pemerintah desa untuk memberikan arahan kepada masyarakat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang

harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.

Penyaluran Informasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan sebab implementors yang melaksanakan kebijakan tersebut harus memahami apa yang harus mereka lakukan. Dalam proses penyaluran informasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) mengkehendaki suatu kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada implementors kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat pemohon izin dan pihak lain yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator keberhasilan komunikasi yang dibahas dalam implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sesuai dengan pendapat Edward III (1980) yaitu terdiri dari kejelasan komunikasi, penyaluran komunikasi, dan konsistensi informasi.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi antar organisasi

tidak hanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa akan tetapi komunikasi antar masyarakat juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu Implementasi agar bisa berjalan dengan baik.

### **Sumber Daya**

Sumber daya yang dimiliki desa Pattappa dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sudah cukup baik, dilihat dari jumlah staf di desa Pattappa sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf dengan total 15 (lima belas) orang perangkat desa. Selain itu staf desa sudah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga mereka paham tentang pengelolaan anggaran dana desa dan pelaksanaan pembangunan harus berjalan efektif dan efisien sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah desa juga harus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan aparat desa agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana desa dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan sumberdaya peralatan yang



dimiliki desa Pattappa dari segi perlengkapan sarana dan prasarana maupun fasilitas sudah cukup memadai, Sarana dan prasarana tersebut diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung desa, pembangunan jalan tani, dll. Serta adanya penyediaan fasilitas, seperti pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, yang diperuntukkan untuk masyarakat tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam proses implementasi. Konsisten dan kejelasan suatu kegiatan tidak akan efektif apabila dalam pelaksanaannya kurang memiliki sumberdaya. Sumberdaya yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: Sumber daya manusia dalam konteks ini ialah staff yang merupakan sumber daya yang paling berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan (Edward III dalam widodo, 2010:98). Sumberdaya manusia harus memiliki jumlah yang cukup serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sumberdaya Peralatan merupakan sarana dan prasarana yang disediakan demi terselenggaranya

pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas (Dwi Nurani, 2009).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

### **Disposisi (*Disposition*)**

Disposisi atau sikap implementor memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana yaitu sikap komitmen, kejujuran, dan tindakan pelaksana.

Sikap pelaksana yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah baik, karena aparat desa selalu berusaha memahami kebutuhan dan keinginan yang masyarakat, selalu berusaha memaksimalkan kinerja pelaksana dalam kegiatan pembangunan desa. sebagai aparat desa mereka harus bersikap komitmen untuk meningkatkan



kualitas kinerja. Selain itu, aparat desa juga sadar bahwa kualitas kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengenai sikap pelaksana sudah sangat membantu masyarakat apalagi jika dilihat dari segi tindakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sangat maksimal, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti adanya pembangunan jalan tani tentu ini sangat mempermudah petani.

Disposisi dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sikap implementors yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit (Winarno, 2004:142). Kecenderungan perilaku dan karakteristik dari pelaksanaan implementasi kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Karakter yang harus

dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen. Komitmen yang tinggi bisa membuat para pelaksana antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) memiliki peran penting dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

### **Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melakukan Implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial, Terdapat dua hal yang penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran

dasar kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berasal dari dalam (*internal*) organisasi. Kedua, dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pemerintah desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan pemahaman dan prosedur yang ada, karena setiap bagian pelaksana memiliki tugas masing-masing dan memiliki prosedur masing-masing yang dijadikan indikator dan acuan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu adanya koordinasi terlebih dahulu antar aparat desa agar tugas dan tanggungjawab yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP) agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah

struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan kebijakan tersebut karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap suatu implementasi. Aspek struktur organisasi meliputi salah satunya mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme didalam implementasi kebijakan itu biasanya sudah ditentukan *standart operation procedur* (SOP). *Standart Operating Procedure* (SOP) merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Pelaksanaan kegiatan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada pelaksana yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya suatu kegiatan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kegiatan harus dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah

diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Secara umum struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Terdapat dua hal yang penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berasal dari dalam (*internal*) organisasi. Kedua, dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi.

### **Faktor Penghambat Implementasi Anggaran Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru**

Dalam suatu proses pembangunan infrastruktur desa tentu memiliki faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa namun ada beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur di desa Pattappa

Salah satu faktor penghambat dalam melakukan pembangunan infrastruktur di desa Pattappa biasanya disebabkan karena faktor cuaca yang tidak baik sehingga harus menunda pelaksanaan pembangunan selain karena faktor cuaca ada beberapa yang menjadi penghambat misalnya sumber daya manusia yang masih kurang baik, rendahnya pengetahuan para pekerja, dan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang masih kurang sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam suatu implementasi. Sedangkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan untuk para pekerja agar dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan pembangunan, selain itu pemerintah desa harus memantau langsung proses pelaksanaan pembangunan serta melakukan musyawarah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan bersama.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan

Pujananting Kabupaten Barru maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 1) Implementasi Anggaran Dana Desa di Desa Pattappa sudah berjalan cukup baik, dilihat dari Komunikasi sudah berjalan baik antara aparat desa dengan masyarakat melalui musyawarah, sumber daya (manusia dan peralatan) yang sudah relatif cukup baik dari jumlah staf maupun dari segi perlengkapan, sikap pelaksana yang selalu berusaha memahami dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta struktur birokrasi dilakukan oleh pemerintah desa mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP). Sehingga pemerintah desa perlu lebih memperhatikan proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui anggaran dana desa agar dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. 2) Dari segi faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Anggaran Dana Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa adalah proses pelaksanaan pembangunan terhambat akibat faktor cuaca, kurang melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum cukup mendukung, serta kemampuan perangkat desa yang belum memadai

sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan infrastruktur desa.

## REFERENSI

- Nurani, D. (2009). *Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: ANDI.
- Setiawan, G. (2009). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Syaukani, dkk. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, N. (2005). *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Sujarweni. V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Pustaka Baru Press.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
- Undang-Undang No 8 tahun 2022 Pasal 7 tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa.